

ABSTRAK

Direksi BUMN sebagai organ pengurus memiliki peranan penting dalam keberjalanan BUMN khususnya dalam hal pengambilan keputusan bisnis. Tidak semua keputusan bisnis yang diambil seorang direksi merupakan tanggung jawab direksi secara pribadi. Namun prakteknya masih banyak direksi BUMN yang dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena keputusan yang diambil menimbulkan kerugian bagi BUMN dan dianggap merugikan negara. Seperti yang terjadi pada direksi PT Pertamina yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait investasi di Blok BMG Australia yang mengalami kerugian dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Padahal apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 kekayaan negara yang menjadi penyertaan modal BUMN tetap masuk kedalam rezim keuangan negara akan tetapi menggunakan paradigma usaha atau *business judgement rule*. Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis dan membahas secara komprehensif dalam penulisan hukum ini yaitu dengan menjelaskan bagaimana pengaturan serta implementasi dari prinsip *business judgement rule*.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif pada kasus yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, *business judgement rule* merupakan sebuah prinsip yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban secara pribadi apabila keputusan bisnis yang diambil didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Perlu diingat bahwa dalam dunia bisnis tidak akan dapat terlepas dari adanya keuntungan dan kerugian atau resiko bisnis. Kerugian PT Pertamina atas investasi *Participating Interest* di Blok BMG Australia merupakan kerugian BUMN dan tidak dapat dikatakan begitu saja sebagai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pemahaman mengenai *business judgement rule* dan unsur-unsur apa yang harus terpenuhi agar direksi mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemerintah sudah seharusnya mengatur perumusan *business judgement rule* secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi multitafsir.

Kata kunci: Direksi, BUMN, BJR

ABSTRACT

The Board of Directors of SOEs as an organ of management has an important role in the running of SOEs, especially in terms of business decision making. Not all business decisions taken by a board of directors are the responsibility of the board of directors personally. But in practice, there are still many SOE directors who are asked to be held personally accountable because the decisions taken cause harm to SOEs and are considered detrimental to the state. As happened to the directors of PT Pertamina who are suspected of having committed corruption related to investments in the Australian BMG Block which suffered losses and caused state financial losses. In fact, when referring to the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XI/2013, state wealth that becomes the capital participation of SOEs remains included in the state financial regime but uses a business paradigm or business judgement rule. This problem becomes the basis for the author to analyze and discuss comprehensively in writing this law, namely by explaining how to regulate and implement the principle of business judgement rule.

The research method used by the author is normative juridical with analytical descriptive research specifications, namely by researching secondary data obtained through literature studies in the form of laws and regulations. This study examines the application of rules or norms in positive law in the cases discussed.

Based on the results of research in writing this law, business judgement rule is a principle that protects directors from personal liability if business decisions taken are based on good faith and prudence. Keep in mind that in the business world will not be able to be separated from the advantages and disadvantages or risks of bisnis. PT Pertamina's loss on Participating Interest investment in the Australian BMG Block is a loss of SOEs and cannot be said to be a state financial loss. Therefore, there is still a need for an understanding of the business judgment rule and what elements must be met in order for the board of directors to get protection. In addition, the government should regulate the formulation of business judgement rules more clearly in the laws and regulations so that there is no multi-interpretation.

Keywords: Directors, SEOs, BJR